



Collaborative Governace Dalam Pengentasan Kemiskinan Melalui Pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (Desa PRIMA) di Yogyakarta

Aulia Rahmawati, Galuh Pancawati

Politeknik STIA LAN Jakarta
auliarahmajuara@gmail.com

***Abstract,** This study aims to determine collaborative governance in poverty alleviation through the development of the Indonesian Women Maju Mandiri village (PRIMA Village) in Yogyakarta seen from the Networked Structure (network structure), Commitment to a Common Purpose (Commitment to Goals), Trust between Participants believe. participants), Governance (Clarity among Governance), Access to Authority (Access to Authority), Distributive accountability/responsibility (Sharing accountability and responsibility), Information Sharing, Access to Resource (Access to Information Resources). As well as the factors that influence collaborative governance in poverty alleviation through prima villages. The research data were collected through a systematic literature review.*

The results of the research show that (1) The network structure in collaborative organizational governance is organic. (2) Commitment to a Common Goal (Commitment to a Purpose) can strengthen ownership and ownership in collaborative governance processes. (3) Trust Among Participants (Mutual Trust among participants), the foundation of trust is a shared understanding of what can be achieved collectively together. (4) Prima Village is managed with clear governance. It is clear who the perpetrators are and the mechanism of accountability is clear. (5) Access to Authority/Access to tasks, division of responsibilities of each actor involved is reflected through the preparation of clear management. (6) Accountability/distributive responsibility, there is a clear arrangement regarding the accountability mechanism through the making of management. (7) Information Sharing, the private sector provides information on prime government and village markets, this creates difficulties in the market. (8) Access to Resources (access to Resources) There must be availability and availability of resources for each stakeholder involved. The suggestions given are (1) It is necessary to make a joint agenda in the collaboration of prime village management in DIY. (2) There needs to be support from the private sector to integrate their raw materials with prime village products to support market sustainability.

Keywords: Collaborative Governance, Poverty, Prima Village

Abstrak, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui collaborative governance dalam pengentasan kemiskinan melalui pengembangan desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (Desa PRIMA) di Yogyakarta dilihat dari *Networked Structure* (struktur jaringan), *Commitment to a Common Purpose* (Komitmen Terhadap Tujuan), *Trust among Participants* (adanya saling percaya diantara peserta), *Governance* (Kejelasan dalam Tata Kelola), *Access to Authority* (Akses terhadap Kewenangan), *Distributive accountability/responsibility* (Pembagian akuntabilitas dan responsibilitas), *Information Sharing* (Sharing Informasi), *Access to Resources* (Akses ke Sumber Informasi). Serta factor-faktor yang mempengaruhi collaborative governance dalam pengentasan kemiskinan melalui desa prima. Data penelitian ini dikumpulkan melalui *systematic literature review*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) *Network structure* (structure network) pada organisasi collaborative governance bersifat organic. (2) *Commitment to a Common Purpose* (Komitmen Terhadap Tujuan) dapat menguatkan kepemilikan dan sense of belong to pada proses collaborative governance. (3) *Trust Among Participant* (Saling Percaya diantara peserta), landasan kepercayaan adalah adanya pemahaman bersama tentang apa yang secara kolektif dapat dicapai secara bersama-sama. (4) Desa Prima dikelola dengan tata kelola yang jelas. Jelas siapa partisipannya dan jelas mekanisme pertanggung jawabannya. (5) *Access to Authority/* Akses terhadap kewenangan, Pembagian tanggung jawab kepada masing-masing actor yang terlibat dicerminkan melalui penyusunan kepengurusan yang jelas. (6) *Distributive accountability/responsibility*, sudah ada penataan yang jelas mengenai mekanisme pertanggung jawabannya melalui penyusunan kepengurusan. (7) *Information Sharing*, Sektor private memberikan informasi pasar kepada pemerintah dan desa prima, hal ini memberikan kemudahan dalam keberlanjutan pasar. (8) *Access to resources* (akses ke Sumber Daya) Harus ada kejelasan dan ketersediaan sumberdaya untuk masing-masing stakeholder yang terlibat. Saran yang diberikan adalah (1) Perlu dibuat agenda bersama dalam kolaborasi pengelolaan desa prima di DIY. (2) Perlu ada support dari sector private untuk mengintegrasikan bahan baku mereka dengan produk desa prima untuk menunjang keberlangsungan pasar.

Kata kunci: *Collaborative Governance*, Kemiskinan, Desa Prima

PENDAHULUAN

Perempuan memiliki peran sentral dalam meningkatkan perekonomian keluarga dan daerahnya. Keterlibatan perempuan dalam pembangunan dan sektor ekonomi menjadi salah satu aspek yang berkontribusi besar dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dipahami dari paradigma pembangunan yang menggandeng perempuan dalam penanggulangan kemiskinan. Meskipun peran perempuan amat strategis namun demikian realitas di lapangan mayoritas orang miskin adalah perempuan. Hal ini dikuatkan dengan data dari UNDP yang menyebutkan 70% penduduk miskin adalah perempuan. Apabila dilihat dari pembagiannya, data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di tahun 2019, kemiskinan tertinggi ditemukan pada anak-anak dan lansia, lagi-lagi secara jumlah, perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki. (Jurnal Perempuan, 2006).

Kemiskinan yang dialami perempuan dalam level yang lebih parah dibandingkan yang dialami oleh laki-laki. Istilah ini dikenal dengan feminisasi kemiskinan.

Feminisasi kemiskinan mendorong perlu dilakukan pendekatan yang sistematis yang berpekspektif gender dalam menghapus kemiskinan. Pendekatan yang sistematis berarti seluruh sistem yang ada harus bekerja bersama menghapus kemiskinan dan seluruh bagian memahami bahwa akar masalah kemiskinan adalah tidak seimbang akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang diperoleh antara laki-laki dan perempuan dalam pembangunan. Dengan melihat data bahwa kemiskinan perempuan lebih banyak dan berdampak luas pada pembangunan, tentu paradigma yang dibutuhkan adalah komitmen penanggulangan kemiskinan yang melihat perempuan bukan hanya sebagai obyek kebijakan namun juga harus sebagai subyek aktif yang dilibatkan dalam seluruh proses penanggulangan kemiskinan.

Dibutuhkan komitmen semua pihak dalam pengentasan kemiskinan dengan melibatkan perempuan sebagai aktor strategisnya menjadi penting untuk dilakukan.

Dalam konteks pengentasan kemiskinan, pengentasan kemiskinan dari desa dianggap lebih strategis untuk mengurai kemiskinan dan melibatkan serta menguatkan aktor-aktor pembangunan khususnya perempuan. Sehingga Program Desa “Perempuan Indonesia Maju Mandiri” atau yang disingkat Desa PRIMA atau kelurahan PRIMA menjadi penting untuk mendapat dukungan dari banyak pihak.

Program Desa PRIMA merupakan salah satu program yang dikembangkan untuk memberi akses dan ruang partisipasi bagi perempuan desa untuk terlibat dalam pengelolaan sumber daya pembangunan yang ada di wilayahnya. Sasaran program Desa Prima ini adalah perempuan dari keluarga miskin atau terancam miskin yang memiliki usaha yang ada di wilayah provinsi DIY Yogyakarta.

Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2016 menempati urutan ke 24 dari 34 provinsi di Indonesia dengan jumlah penduduk miskin yang tinggi. (www.bappenas.go.id). Kemiskinan yang ada

di DIY dikarenakan beberapa factor, yaitu lajunya tingkat pertumbuhan penduduk, usia harapan hidup penduduknya tinggi, jumlah angkatan kerja rendah sehingga beban ketergantungan tinggi. Permasalahan kemiskinan merupakan masalah yang harus segera diatasi oleh Pemda DIY sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Keterkaitan antara kondisi kemiskinan dan perempuan tidak dapat dipisahkan. Berdasarkan hasil sakernas DIY Februari 2017, tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki sebesar 81.07 persen jauh lebih tinggi dibanfingkan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan yang hanya 63.29 persen.

Sejak tahun 2008, Desa Prima diyakini dapat menjadi suatu alternatif atau terobosan dalam upaya pemberdayaan perempuan dalam bidang ekonomi melalui peningkatan pemberdayaan perempuan dan peningkatan pendapat kelompok perempuan khususnya keluarga miskin. (Sumber: www.dinp3ap2kb.slemankab.go.id)

Program Desa PRIMA dapat terealisasi tentu dapat terealisasi dengan kerja sama multi aktor. Pembangunan tentu tidak bisa mencapai hasil yang maksimal jika tidak melibatkan seluruh masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Harus diakui bahwa posisi perempuan dalam pembangunan selama ini terpinggirkan. Winarso (2002:25) menyatakan bahwa pembangunan harus dilakukan bersama-sama untuk menumbuhkan sinergi (*synchronized energies*) melalui *sharing resources*. Sehingga dapat meminimalisir sengketa maupun konflik yang timbul dari kecemburuan dan kesalahpahaman dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya.

Sinergi dalam pengelolaan sumber daya memberikan akses bagi perempuan untuk ikut serta dalam memperbaiki kondisi hidupnya dan sekaligus memberikan nilai tambah pada ekonomi keluarga.

Untuk itu penelitian ini ditujukan untuk mengetahui *collaborative governance* dalam pengentasan kemiskinan melalui pengembangan Desa PRIMA di DI Yogyakarta

KAJIAN TEORITIS

Kemiskinan

Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk kebutuhan hidup. Kemiskinan adalah kekurangan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai suatu standar hidup yang layak (Yulianto, 2005). Chambers (1983) dalam Soetrisno (1995) dalam Marwanti dan Astuti (2012) mengemukakan bahwa inti dari masalah kemiskinan terletak pada deprivation trap atau jebakan kekurangan. Deprivation trap terdiri dari lima ketidakberuntungan yang melilit kehidupan keluarga miskin, yaitu (1) kemiskinan itu sendiri; (2) kelemahan fisik; (3) keterasingan; (4) kerentanan dan (5) ketidakberdayaan.

Dalam hal program-program yang ditujukan secara langsung untuk menangani masalah kemiskinan dalam jangka panjang mungkin tidak efektif apabila program-program tersebut tidak diikuti dengan pemberdayaan social dan politik. (Hempri, 2013). Darwin (2005) menyebutkan

komitmen Internasional United Nation Millenium Declaration (2000) memuat satu rekomendasi penting untuk diterapkan di semua negara yaitu: “*to promote gender equality and empowerment of women as effective ways to combat poverty, hunger and disease and to stimulated development that is sustainable.*” Dengan demikian pemberdayaan perempuan merupakan cara yang efektif dalam mengatasi kemiskinan.

Desa PRIMA (Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri)

Program Desa PRIMA merupakan amanat Inpres RI no 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, Permen PPPA No 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pembangunan Industri Rumahan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Perempuan. Oleh sebab itu program Desa PRIMA ini dapat berperan dalam menanggulangi kemiskinan melalui upaya ekonomi dengan mengidentifikasi dan memanfaatkan seluruh potensi baik Sumber Daya Alam (SDA) maupun Sumber Daya Manusia (SDM).

Desa/Kelurahan PRIMA dilaksanakan dalam rangka mendukung pelaksanaan program prioritas 3 ENDS (3 Akhri) yang meliputi (1) akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak (2) akhiri perdagangan manusia (3) akhiri kesenjangan ekonomi antara laki-laki dan perempuan. (Buku Pedoman Desa PRIMA DI Yogyakarta: 2019)

Collaborative Governance

Ansel dan Gash (2007:543) mendefinisikan *collaborative governance* sebagai sebuah pengaturan pemerintahan dimana satu atau lebih lembaga-lembaga publik terlibat secara langsung dengan stakeholder non negara dalam sebuah proses pembuatan keputusan kolektif yang formal, berorientasi konsensus dan, *deliberative* (musyawarah) yang bertujuan untuk implementasi kebijakan publik atau manajemen publik ataupun aset.

Senada dengan pernyataan Ansel dan Gash tersebut, Emerson (2011:12) menyatakan collaborative governance sebagai proses dan struktur pengambilan keputusan kebijakan public dan manajemen yang melibatkan prang-orang secara konstruktif melampaui batas-batas lembaga-lembaga public, tingkat pemerintahan, dan atau apakah lembaga public, swasta dan masyarakat untuk melaksanakan kepentingan umum yang tidak bias dicapai apabila dilakukan oleh satu pihak saja.

Binghams (2010) menyebutkan kolaborasi sebagai kerja bersama untuk mencapai tujuan bersama melampaui batas-batas hubungan multisector dan multi actor. Selanjutnya Bingham menggambarkan kolaborasi melibatkan beberapa actor yang saling membantu satu sama lain untuk mencapai tujuan tertentu, actor-aktor ini tidak hanya bekerja pada satu sector saja melainkan multi sector. Sedangkan makna governance merupakan sebuah system government. Sehingga collaborative governance merupakan system yang menggunakan metode kolaborasi melibatkan berbagai actor yang bekerja dalam beberapa sector untuk mencapai tujuan bersama.

Menurut Agranov & Mcguire (Joo Chang, 2009) Collaborative Governance lebih banyak menekankan pada kerjasama sukarela antara actor multisector, karena permintaan klien seringkali melebihi kapasitas dan peran tunggal pemerintah, dan membutuhkan interaksi dengan beragam organisasi dalam kegiatan public. Sehingga kolaborasi perlu menyusun tata kelola yang secara efektif memenuhi tuntutan yang meningkat yang timbul dari manajemen cross-governmental dan batas sectoral.

Penelitian ini menggunakan teori Collaborative Governance dari DeSev dalam Sudarmo (2011: 110-116) yang meliputi indicator-indikator sebagai berikut:

a) *Type network structure* (Tipe Struktur Jaringan)

Menjelaskan gambaran konseptual dari hubungan antara elemen satu dengan elemen yang lain yang bekerja yang mencerminkan elemen network yang dikelola. Dalam *collaborative governance*, element jaringan seharusnya tidak berbentuk hierarki yang menekankan kekuasaan pada satu elemen saja. Namun seharusnya berbentuk organic dengan struktur jaringan yang kekuasaan tidak hierarki, dominasi atau monopoli. Sehingga semua pihak memiliki hak, kewajiban, tanggung jawab, kewenangan dan kesempatan yang sama untuk mengakses pencapaian tujuan.

b) *Commitment to common purposes* (Komitmen terhadap Tujuan Bersama)

Komitmen terhadap tujuan bersama adalah alasan mengapa kerjasama harus ada karena perhatian dan komitmen untuk mencapai tujuan yang akan dicapai bersama. Komitme yang dibuat seharusnya tidak hanya menguntungkan satu pihak saja. Sehingga komitmen yang dibangun dalam *collaborative governance* seharusnya untuk kepentingan bersama melalui pencarian solusi gabungan.

c) *Trust among participants* (Kepercayaan diantara Partisipan)

Kepercayaan diantara partisipan adalah hubungan profesional atau sosial dan keyakinan bahwa peserta mempercayakan informasi atau upaya dari pemangku kepentingan atau pemangku kepentingan lainnya dalam jaringan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam hal ini masing-masing stakeholder harus percaya satu sama lain karena sebagai bentuk hubungan profesional yang dibangun untuk mencapai kesuksesan pelaksanaan *collaborative governance*.

d) *Governance* (Tata Kelola)

Governance merupakan hubungan dari kepercayaan diantara *governance actor or government*. Hal ini juga mencakup, beberapa rules yang secara bersama-sama disetujui oleh masing-masing stakeholder, dan ada kebebasana untuk menentukan bagaimana kolaborasi akan dilakukan. Dalam hal ini, *governance* dapat disebut dengan *governance* apabila ada kejelasan siapa anggota dan bukan anggota.

e) *Access to Authority* (Akses kepada Kewenangan)

Akses kepada kewenangan merupakan ketersediaan dari kriteria atau procedure yang jelas dan diterima secara luas. Sehingga ada *rules of authority* yang diterima masing-masing stakeholder untuk megemban tugas mereka sesuai dengan kewenangannya.

f) *Distributive Accountability/responsibility* (Distribusi Tanggung Jawab)

Distribusi Tanggung Jawab adalah penataan, manajemen bersama dengan stakeholder dan berbagi pembuatan keputusan kepada semua anggota kerjasama dan membagi tanggung jawab untuk mencapai hasil yang diinginkan, dan masing-masing stakeholder harus terlibat dalam pembuatan keputusan bersama.

g) *Information Sharing* (Berbagi Informasi)

Informasi bersama yang mudah diakses oleh anggota kerjasama, proteksi privasi, dan akses yang terbatas untuk non anggota selama dapat diterima oleh semua anggota kerjasama. Sehingga dalam collaborative governance harus ada pembagian informasi yang jelas, dan informasi mudah diakses oleh seluruh anggota.

h) *Access to resources* (Akses kepada Sumber Daya)

Akses terhadap sumberdaya artinya adalah ketersediaan finansial, technical, manusia dan sumberdaya lainnya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan kerjasama. Sehingga harus ada kejelasan dan ketersediaan sumberdaya untuk masing-masing stakeholder yang terlibat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada Desa/Kelurahan PRIMA yang ada pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian studi kasus, yaitu suatu pendekatan untuk mempelajari, menerangkan atau menginterpretasi suatu kasus (*case*) dalam konteksnya secara natural tanpa adanya intervensi dari pihak luar (Salim, 2001:93). Penggunaan Studi Kasus ini dikarenakan fenomena sosial tersebut hanya terjadi pada masyarakat dan wilayah tersebut, sehingga mampu melihat secara mendalam sebuah fenomena beserta lingkungan yang mempengaruhinya.

Penelitian menggunakan metode systematic literature review. Systematic review adalah suatu metode penelitian untuk melakukan identifikasi, evaluasi dan interpretasi terhadap semua hasil penelitian yang terkait pertanyaan penelitian tertentu, topik tertentu, atau fenomena yang menjadi perhatian (Kitchenham, 2004). Systematic Review akan sangat bermanfaat untuk melakukan sintesis dari berbagai hasil penelitian yang relevan, sehingga fakta yang disajikan kepada penentu kebijakan menjadi lebih comprehensive dan berimbang.

SLR Systematic Literature Review adalah studi sekunder untuk memetakan, mengidentifikasi, mengevaluasi secara kritis, mengkonsolidasikan dan mengumpulkan hasil studi utama pada topik penelitian tertentu. 9. SLR menjadi metode standar untuk mendapatkn jawaban dengan melakukan tinjauan pustaka berdasarkan studi terkait sebelumnya

PEMBAHASAN

1 Collaborative Governance pada Pengembangan Desa/Kelurahan PRIMA

a. *Networked Structure* (Struktur Jaringan)

Struktur Jaringan pada Desa Prima lebih bersifat organic. Sifat organic pada organisasi collaborative governance ini membuat interaksi dan koordinasi antar stakeholder lebih fleksibel. Hal ini juga diraskan dalam pengelolaan desa prima oleh pengurus desa prima sendiri. Memberikan keleluasaan kewenangan kepada penggerak desa prima khususnya perempuan untuk mengambil keputusan atas usaha apa yang akan dilakukan dan bagaimana mengelola dan mempertanggung jawabkan kegiatannya kepada pemerintah dalam hal ini Dinas Perempuan dan Anak Provinsi DI Yogyakarta.

Pengelola Desa Prima juga dapat bekerja sama dengan sector swasta untuk mengembangkan usahanya.

b. *Commitmen to a Common Purpose* (Komitmen Terhadap Tujuan)

Komitmen dapat dibangun melalui *sharing ownership* “kepemilikan” dalam proses dan eksplorasi keuntungan-keuntungan bersama.

Fokus desa Prima memang menekankan keterlibatan perempuan dalam pengentasan kemiskinan, karena angka kemiskinan tertinggi baik itu di perkotaan maupun di perdesaan adalah perempuan. Meskipun demikian keuntungan pengembangan desa prima yang ada di Yogyakarta dapat menggerakkan perekonomian desa dan memberkan keuntungan ekonomis tidak hanya bagi perempuan namun warga desa lainnya.

Desa PRIMA bertujuan untuk meningkatkan kapasitas SDM perempuan Indonesia bidang ekonomi sehingga meningkatkan kontribusi dan keikutsertaanya dalam pelaksanaan pembangunan baik ekonomi ataupun bidang lainnya. Hal ini berarti pula dapat membuka dan memperluas kesempatan bagi kaum perempuan untuk mengembangkan potensi dirinya sekaligus meningkatkan kesejahteraan hidupnya melalui pengembangan ekonomi produktif. Disamping itu dapat memperkuat *bargaining position* kaum perempuan dalam mengakses sumber daya ekonomi.

Dengan tujuan sebagaimana disebutkan diatas tentu perempuan desa tidak dapat mencapainya sendiri. Diperlukan komitmen bersama baik itu pemerintah di segala level dari pemerintah provinsi hingga pemerintah desa, swasta dan masyarakat itu sendiri bawa dengan memberdayakan perempuan secara ekonomi perempuan juga dapat menopang ekonomi keluarga yang muaranya adalah melepaskan diri dari jerat kemiskinan

Sehingga semua pihak bertanggung jawab dalam pengembangan Desa PRIMA di DI Yogyakarta. Penguatkan komitmen tidak bisa dilepaskan dari monitoring yang dilakukan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan anak.

Komitmen berbagai pihak dalam mengembangkan desa Prima di Yogyakarta sudah cukup tinggi, hal ini dapat dilihat dari jumlah desa prima yang terus naik dari mulai awal pendirian pada tahun 2008 sejumlah 6 desa prima hingga 85 desa pada tahun 2018.

c. *Trust among Participants* (adanya saling percaya diantara peserta)

Landasan kepercayaan adalah adanya pemahaman bersama tentang hal-hal apa yang secara kolektif dapat mereka capai bersama-sama. Pemahaman bersama ini tentunya dapat dibangun dengan melakukan pendefinisian masalah bersama dan nilai-nilai apa yang digunakan oleh aktor-aktor yang *terlibat collaborative governance* dalam pengembangan dan desa prima.

Kepercayaan antara partisipan ini dapat dikembangkan dengan adanya komunikasi yang massif dan sharing informasi yang tepat dalam kolaborasi pengembangan desa prima. Kolaborasi yang dibangun sudah ada rasa saling percaya antara peserta baik itu pemerintah, masyarakat dan swasta. Hal ini dapat dilihat bahwa setiap anggota Desa Prima tau betul berapa anggaran yang diberikan untuk mengelola desa prima, dan unit usaha yang kemudian disepakati bersama untuk dikembangkan, bagaimana mengembangkan unit usaha tersebut dan bagaimana keuntungan akan dibagi serta bagaimana mekanisme pertanggung jawaban akan dilakukan.

Dan pengurus desa prima di DIY adalah penduduk asli masing-masing desa. Dan program ini merupakan program peningkatan kesejahteraan keluarga dengan melibatkan perempuan miskin. Sehingga masing-masing pengurus memiliki kohesivitas yang tinggi untuk mensukseskan program desa Prima.

d. *Governance* (Kejelasan dalam Tata Kelola)

Desa Prima dijalankan oleh pengurus yang dipilih secara langsung melalui rapat anggota. Dimana pengurus akan bertanggung jawab kepada rapat anggota.

Pengendalian Desa Prima dilakukan melalui dua cara antara lain pelaporan dan monitoring dan evaluasi. Pelaporan dilakukan secara periodik terhadap perkembangan desa Prima dan pelaporan pengelolaan bantuan pengautan kelembagaan. Pelaporan penguatan kelembagaan ini dibuat per semester dan disampaikan kepada organisasi perangkat daerah yang membidangi PPPA (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) provinsi dan kabupaten/kota, desa/kelurahan.

Monitoring dan evaluasi digunakan sebagai salah satu tool dalam memonitor pertumbuhan Desa Prima yang ada di DI Yogyakarta. Salah satu mekanisme evaluasi yang dilakukan adalah dengan membuat lomba Desa Prima. Dengan demikian masing-masing desa prima yang ada di wilayah Provinsi DI Yogyakarta akan berusaha meningkatkan kinerja dan kemanfaatannya.

Disamping itu dalam aspek tata kelola ini, tentu ada perbedaan yang jelas mana yang menjadi anggota desa prima dan mana yang bukan. Peserta yang menjadi anggota desa prima ini yang memiliki kewenangan untuk ikut serta melakukan kerjasama-kerjasama pengembangan desa prima.

e. *Access to Authority* / Akses terhadap Kewenangan

Dalam menjelaskan *access to authority* ini perlu kita jelaskan terlebih dahulu struktur kepengurusan pada desa prima dan actor-aktor yang terlibat dalam kolaborasi pengembangan desa prima. Pengurus desa prima dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Rapat Anggota. Susunan pengurus desa prima dapat dilihat melalui gambar 1 berikut ini.



Gambar 1.
Struktur Organisasi.

Posisi Pelindung dipegang oleh kepala desa atau lurah, dalam hal ini pelindung berfungsi melindungi desa prima dalam pelaksanaan kegiatan desa prima dan dalam interaksi dengan pihak eksternal. Pembina berfungsi sebagai tempat bertanya, berkoordinasi, inisiator program dalam pelaksanaan kegiatan dan pengembangan desa prima. Posisi pembina ini biasanya dipegang oleh ketua TP PKK dan Kepala Seksi yang membidangi masyarakat. Dan posisi Ketua, sekretaris dan bendahara yang memiliki kewenangannya masing-masing.

Alur Komando pengelolaan desa prima. Alur komando menunjukkan alur perintah dalam pengelolaan desa prima. Rapat anggota menjadi penentu dalam setiap pemuatan keputusan strategis pengembangan desa prima.



Gambar 2
Alur Komando
(Sumber: Buku Pedoman Desa Prima 2019)

Rules of authority masing-masing struktur ini sangat jelas dan diterima secara luas oleh masing-masing anggota untuk mengemban tugas sesuai kewenangannya.

f. *Distributive accountability/ responsibility* (Pembagian akuntabilitas dan responsibilitas)



Gambar 3
Alur Tanggung Jawab
(sumber: Buku Pedoman Desa Prima 2019)

Gambar 3 tentang alur tanggung jawab dapat dilihat bahwa sudah ada penataan yang jelas mengenai mekanisme pertanggung jawabannya. Melalui pembagian kepemimpinan sudah mencerminkan pembagian tanggung jawab antara masing-masing aktor yang terlibat dalam pengembangan desa prima. Sehingga masing-masing dapat mengambil keputusan dalam pengembangan desa prima itu sendiri.

g. Information Sharing (Sharing Informasi)

Sector private memberikan informasi terkait dengan pasar kepada pemerintah dan pengelola desa prima. Pembagian informasi yang cepat dan jelas ini memberikan kemudahan kepada desa-desa prima untuk memasarkan produknya ke pasar.

h. Access to resources (Akses ke Sumber Daya)

Akses terhadap sumberdaya artinya adalah ketersediaan finansial, technical, manusia dan sumberdaya lainnya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan kerjasama. Sehingga harus ada kejelasan dan ketersediaan sumberdaya untuk masing-masing stakeholder yang terlibat.

2. Faktor –Faktor yang mempengaruhi dan menghambat pengembangan desa prima.

Pertumbuhan desa prima dapat dikategorikan melalui klasifikasi berikut ini:

Klasifikasi	Anggota	Dana Bergulir	Usaha
Tumbuh	25	-	Embrionik-Mikro
Berkembang	Bertambah	Bertambah	Embrionik- Mikro
Maju	Bertambah	Bertambah	Mikro

Desa prima yang ada di DIY memiliki klasifikasi yang beragam. Hal ini dipengaruhi oleh kinerja desa prima yang berbeda satu sama lain.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Proses kolaborasi merupakan proses non linear sebagai pencapaian dari
 - a. Network structure (*structure networl*) pada organisasi collaborative governance bersifat organic sehingga lebih luwes dan lebih cepat menangkap perubahan lingkungan dan mensyaratkan mekanisme koordinasi lebih mudah.
 - b. *Commitmen to a Common Purpose* (Komitmen Terhadap Tujuan) dapat menguatkan kepemilikan dan sense of belong to pada proses collaborative governance pada pengelolaan dan pengembangan desa Prima.
 - c. *Trust Among Participant (Saling Percaya diantara peserta)*, landasan kepercayaan adalah adanya pemahaman bersama tentang apa yang secara kolektif dapat dicapai secara bersama-sama.
 - d. *Governance (Kejelasan dan Tata Kelola)*
Desa Prima dikelola dengan tata kelola yang jelas. Jelas siapa partisipannya dan jelas mekanisme pertanggung jawabannya.

- e. *Access to Authority/ Akses terhadap kewenangan.*
Pembagian tanggung jawab kepada masing-masing actor yang terlibat dicerminkan melalui pembagian kepengurusan yang jelas.
 - f. *Distributive accountability/responsibility*
Sudah ada penataan yang jelas mengenai mekanisme pertanggung jawabannya melalui penyusunan kepengurusan.
 - g. *Information Sharing*
Sektor private memberikan informasi pasar kepada pemerintah dan desa prima, hal ini memberikan kemudahan dalam keberlanjutan pasar.
 - h. *Access to resources (akses ke Sumber Daya)*
Harus ada kejelasan dan ketersediaan sumberdaya untuk masing-masing stakeholder yang terlibat.
2. Saran yang diberikan berkenaan dengan penelitian yang dilakukan adalah:
- a. Perlu dibuat agenda bersama dalam kolaborasi pengelolaan desa prima di daerah DIY sehingga semua desa prima dapat berkembang dengan merata.
 - b. Perlu ada support dari sector private untuk menginterasikan bahan baku usaha mereka dengan produksi dari desa primal, sehingga menunjang kelancaran pasar.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, Chris & Gash, Alison. 2007. Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory* 18: 543-571
- Bingham L. Blomgren. 2010. The Next Generation of Administrative Law: Building The Legal Infrastructure for Collaborative Governance. *Winconsin Law Review*: 298-350
- Moleong, Lexy J., 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Beierle, Thomas C., and David Konisky. 2001. What are we gaining from stakeholder involvement? Observations from environmental planning in the Great Lakes. *Environment and Planning C: Government and Policy* 19:515–27.
- Burger, Joanna, Michael Gochfeld, Charles W. Powers, Lynn Waishwell, Camilla Warren, and Bernard D. Goldstein. 2001. Science, policy, stakeholders, and fish consumption advisories: Developing a fish fact sheet for Savannah River. *Environmental Management* 27: 501–14
- Djadijono, M et al.,. 2006. *Membangun Indonesia dari Daerah*. Jogja: Percetakan Kanisius Katulistiwa
- Feiock, R. C. 2007. Rational Choice and Regional Governance. *Journal of Urban Affairs*, 29 (1): 47-63.
- Futrell, Robert. 2003. Technical adversarialism and participatory collaboration in the U.S. chemical weapons disposal program. *Science, Technology, & Human Values* 28:451–82.

- Gitsham, Matthew & Page, Nadine. 2014. Designing Effective Multy-Stakeholder Collaborative Platforms: Learning from the Experiance of the UN Global Compact LEAD Initiative. *SAM Advanced Management Journal*-Autumn 2014
- Hadi, Sutrisno. 1993. *Statistik 3*. Yogyakarta: Andi Offset
- Kitchenham, B. 2004. Procedures for Performing Systematic Reviews. Eversleigh: Kalee University.
- Lasker, Roz D., Elisa S. Weiss, Rebecca Miller. 2001. Partnership synergy: A practical framework for studying and strengthening the collaborative advantage. *The Milbank Quarterly*, 79 (2): 179–205.
- Logsdon, Jeanne. 1991. Interests and interdependence in the formation of social problem-solving collaborations. *Journal of Applied Behavioral Science* 27:23–37
- Reilly, Thom. 2001. Collaboration in action: An uncertain process. *Administration in Social Work* 25 (1): 53–73.
- Rozi, Fahrur. Systematic Literature Review pada Analisa Prediktif. Dengan IoT: Tren Riset, Metode, dan Arsitektur. *Jurnal Sistem Cerdas 2020 Vol 03- No)1 eISSN: 2622-8254 Hal 43-53*
- Sudarmo. 2015. *Menuju Model Resolusi Konflik Berbasis Governance: Memuat Pengalaman Penelitian Lapangan Tentang Isu Pedagang Kaki Lima dan Konflik Antar Kelompok*. Surakarta: UNS Press
- Whitman & Wolf. 2010. International Affairs vol 86 (1) Journal Compilation: Blackwell Publishing Ltd / *The Royal Institute of International Affairs pg 104-105*
- Winarso, Haryo et al.,. 2002. Pemikiran dan Praktek Perencanaan dalam Era Transformasi di Indonesia. Departemen Teknik Planologi ITB. Yayasan Sugijanto Soegijoko
<https://dinp3ap2kb.slemankab.go.id/2020/09/sosialisasi-desa-prima-tahun-2020/> diakses tangga; 14 Maret 2021
www.bappenas.go.id
Permen PPA No 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pembangunan Industri Rumahan